



## KIPRAH ORGANISASI WANITA TAMAN SISWA DALAM MEMPERJUANGKAN HAK PENDIDIKAN PEREMPUAN INDONESIA

**Amalina Haidah**

[amalinahaidah060403@students.unnes.ac.id](mailto:amalinahaidah060403@students.unnes.ac.id)

Universitas Negeri Semarang

### Informasi Artikel

**Kata Kunci :**

Pergerakan Perempuan Indonesia, Organisasi Wanita Taman Siswa, Memperjuangkan Hak Pendidikan

**Keywords:**

Indonesian Women's Movement, Taman Siswa Women's Organization, Fighting for the Right to Education



This is an open access article under the [CC-BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

Copyright ©2023 by Author.  
Published by Universitas Jambi

### ABSTRAK

Tujuan awal diberlakukannya kebijakan Politik Etis yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat di tanah jajahan. Namun, dalam pelaksanaannya memperlihatkan sisi ketidakadilan. Kepentingan pihak kolonial selalu diprioritaskan di atas kepentingan rakyat pribumi. Terlebih dalam pelaksanaan Politik Etis di bidang edukasi yang terkesan rasial dan diskriminatif. Pendidikan hanya ditujukan bagi anak-anak keturunan Eropa, Timur Asing (Arab dan Cina), kaum bangsawan dan dikhususkan untuk kaum laki-laki saja. Pada saat itu kaum perempuan Indonesia hanya dianggap sebelah mata dan diperlakukan sewenang-wenang dalam segala hal. Kekangan adat istiadat juga turut andil dalam membatasi kebebasan perempuan dalam mengenyam pendidikan. Melihat kondisi demikian kaum wanita pribumi bangkit untuk memperjuangkan hak pendidikan mereka melalui organisasi-organisasi perempuan. Salah satu organisasi perempuan tersebut yaitu Organisasi Wanita Taman Siswa. Tujuan penulisan artikel ilmiah ini adalah untuk mengetahui bagaimana kiprah perempuan yang tergabung dalam Organisasi Wanita Taman Siswa dalam memperjuangkan hak pendidikan dan kesetaraan kedudukan dengan kaum laki-laki. Metode

yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini yaitu dengan studi pustaka yang berpedoman pada tahapan-tahapan penelitian sejarah yaitu Heuristik, Kritik Sumber, Interpretasi dan Historiografi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Organisasi Wanita Taman Siswa merupakan wadah bagi kaum perempuan pribumi untuk menyalurkan aspirasinya melawan ketidakadilan pemerintah kolonial Hindia Belanda dalam bidang pendidikan.

### ABSTRACT

*The initial objective of implementing the Ethical Politics policy was to improve the welfare of the people in the colonial lands. However, in practice it reveals the side of injustice. The intelligence of the colonial side was always prioritized over the interests of the indigenous people. Especially in the implementation of Ethical Politics in the field of education which seems racist and discriminatory. Education is only aimed at children of European descent, Foreign East (Arabic and Chinese), nobility and specifically for men only. At that time, Indonesian women were only looked down upon and treated arbitrarily in all respects. Customary restraints also contributed to limiting women's freedom in obtaining education. Seeing these conditions, indigenous women rose to fight for their right to education through women's organizations. One such women's organization is the Taman Siswa Women's Organization. The purpose of writing this scientific article is to find out how the progress of women who are members of the Taman Siswa Women's Organization in fighting for educational rights and equality with men. The method used in writing this scientific article is literature study which is guided by the stages of historical research, namely Heuristics, Source Criticism, Interpretation and Historiography. The results of this study are that the Taman Siswa Women's Organization is a forum for indigenous women to channel their aspirations against the injustice of the Dutch colonial government in the field of education.*

## PENDAHULUAN

Awal abad ke-20, politik kolonial di Indonesia memasuki babak baru, yaitu dilaksanakannya Politik Etis atau Politik Balas Budi (bahasa Belanda: *Ethische Politiek*). Politik Etis bermula dari munculnya tulisan Conrad Theodore van Deventer atau yang lebih dikenal van Deventer berjudul "*Een Eereschuld*" yang artinya hutang kehormatan pada majalah *de Gids* pada tahun 1899. Isi pokok dari tulisan tersebut adalah mengecam pihak Kerajaan Belanda dan pemerintahan kolonialnya yang tidak memperhatikan nasib penduduk di tanah jajahannya (Harisuprihanto, 2019: 50). Van Deventer mengungkapkan bahwa Kerajaan Belanda sudah berhutang kepada rakyat Indonesia dan harus menebusnya dengan cara memberikan kesejahteraan. Ide tersebut didukung oleh beberapa tokoh liberal seperti van Kol, van Dedem, dan Pieter Brooshooft (seorang wartawan *De Locomotief*). Ratu Belanda Wilhelmina juga menanggapi positif terkait usulan itu. Hal tersebut dibuktikan ketika ia berpidato pada tahun 1901 dan mengesahkan pelaksanaan Politik Etis. Van Deventer berpendapat bahwa Politik Etis dapat dilakukan dengan tiga hal, yakni irigasi (pengairan), transmigrasi (pindahan penduduk), dan edukasi (pendidikan).

Pelaksanaan Politik Etis tetap memperlihatkan sisi ketidakadilan dan berat sebelah. Kepentingan pihak kolonial selalu diprioritaskan di atas kepentingan rakyat Indonesia. Terlebih dalam pelaksanaan Politik Etis di bidang edukasi (pendidikan) yang terkesan rasis dan diskriminatif. Pendidikan hanya ditujukan bagi golongan-golongan tertentu saja, seperti anak-anak keturunan Eropa, Timur Asing (Arab dan Cina), kaum bangsawan dan dikhususkan untuk laki-laki saja (Haidah, 2020). Pada saat itu, perempuan Indonesia dipandang sebelah mata, dianggap sebagai manusia yang lemah, serta diperlakukan sewenang-wenang dalam segala hal. Orang-orang di masa itu mendefinisikan ruang gerak perempuan hanya sebatas di wilayah dapur, sumur, dan kasur. Kekangan adat istiadat juga turut andil dalam membatasi kebebasan perempuan dalam mengenyam pendidikan. Adanya diskriminasi dan sentimen tersebut membuat kaum perempuan Indonesia bangkit dalam rangka memperjuangkan hak-haknya terutama dalam bidang pendidikan. Langkah yang mereka lakukan untuk mencapai hal tersebut yaitu dengan membentuk organisasi-organisasi perempuan Indonesia. Organisasi-organisasi perempuan yang dibentuk bersifat umum dan sukarela, serta rata-rata memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan pendidikan bagi gadis-gadis pribumi agar menjadi cerdas, terampil, dan mandiri.

Contoh organisasi wanita pertama yang memelopori pergerakan perempuan di Indonesia yaitu Putri Mardika yang didirikan pada tahun 1912 di Jakarta atas dasar prakarsa dari Boedi Oetomo. Organisasi ini dibentuk untuk memperjuangkan pendidikan kaum perempuan, mendorong perempuan agar percaya diri tampil di depan umum, membuang perasaan takut, serta mengangkat perempuan agar kedudukannya setara dengan kaum laki-laki (Cahyani & Swastika, 2015). Selain itu, di luar negeri juga berdiri organisasi perempuan bernama *National Organization for*

*Women* (NOW) yang didirikan pada tahun 1966 di Amerika Serikat dengan mengangkat cita-cita pergerakan feminisme.

Selain organisasi Putri Mardika, organisasi perempuan yang dibentuk pada masa pergerakan nasional dan memiliki misi untuk memperjuangkan keadilan dan hak pendidikan bagi perempuan Indonesia adalah Organisasi Wanita Taman Siswa. Sejarah organisasi tersebut selaras dengan berdirinya organisasi Taman Siswa yang dirintis dan dipimpin oleh Ki Hadjar Dewantara, istri beliau yang bernama Raden Ajeng Sutartinah atau yang akrab disapa Nyi Hadjar Dewantara pada tahun 1922 juga membuat perhimpunan kaum wanita di kalangan Taman Siswa. Maksud dari adanya perhimpunan tersebut yaitu agar para perempuan turut beraktivitas untuk mendukung kesuksesan organisasi Taman Siswa. Kemudian, pada perkembangan selanjutnya yaitu pada tahun 1923, kegiatan yang digagas oleh Nyai Hadjar Dewantara ini menjadi bagian dari organisasi Taman Siswa yang diberi nama “Majelis Wanita” (*Vrouwenrad*) yang beranggotakan para guru wanita dan istri guru di kalangan Taman Siswa. Seperti halnya organisasi Taman Siswa, organisasi wanita ini juga memiliki cabang-cabang di luar Kota Yogyakarta (Kowani, 2017).

Penulisan artikel ilmiah ini bertujuan untuk menguraikan kiprah perempuan yang tergabung dalam Organisasi Wanita Taman Siswa dalam memperjuangkan hak pendidikan dan kesetaraan kedudukan dengan kaum laki-laki. Mengingat perjuangan perempuan sering kali terasingkan oleh banyaknya tulisan tentang peranan kaum laki-laki. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tulisan-tulisan sejarah di Indonesia masih bersifat *male domain*, dimana laki-laki selalu menjadi tokoh utama yang paling unggul dan kaum perempuan hanya sebagai pemeran pendukung. Menurut sejarawan Kuntowijoyo, “sejarah yang ditulis dengan kaum laki-laki sebagai tokoh utama dan perempuan sebagai pemeran pembantu adalah sejarah yang masih bercorak androcentric” (Kuntowijoyo, 2003:115). Selain itu, artikel ini juga akan mengupas terkait pengaruh Organisasi Wanita Taman Siswa bagi pendidikan perempuan Indonesia saat ini.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan artikel ilmiah ini adalah metode sejarah (*historical method*) yaitu petunjuk sistematis yang digunakan untuk membantu pengumpulan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis, serta mengajukan sintesis, kemudian disajikan dalam bentuk tertulis (Garragham, 1957:33). Pada penelitian sejarah terdapat empat komponen yang digunakan untuk menyusun tulisan sejarah yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

1. Tahap pertama adalah *heuristik*, yaitu mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber atau bukti-bukti sejarah dalam rangka memperoleh data yang sesuai. Dalam tahapan ini perlu dicari dari beberapa sumber terkait judul artikel “Kiprah Organisasi Wanita Taman Siswa dalam Memperjuangkan Hak Pendidikan Perempuan Indonesia”. Fokus utama pencarian sumber data artikel ini yaitu terkait sejarah dan kiprah Organisasi Wanita Taman Siswa dalam memperjuangkan

keadilan kedudukan dan pendidikan bagi perempuan-perempuan Indonesia secara luas. Sumber-sumber yang peneliti peroleh yaitu berupa buku, artikel jurnal yang diakses melalui *Google Scholar*, dan website resmi kowani.or.id.

2. Tahap kedua adalah *kritik sumber*, yaitu menguji kredibilitas untuk mengetahui kebenaran informasi yang disampaikan oleh data-data atau sumber sejarah. Informasi yang diperoleh harus valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
3. Tahap ketiga adalah *interpretasi*, yaitu upaya penafsiran fakta-fakta sejarah untuk merekonstruksi hal-hal yang terjadi di masa lampau agar menjadi satu kesatuan. Penafsiran yang dilakukan harus logis atau masuk akal. Setelah mendapatkan sumber-sumber yang diperlukan tentunya harus selektif atau teliti dalam menerangkan fakta sejarah yang diperlukan untuk mendukung tulisan karya ilmiah ini (Laksono, 2018: 110).
4. Tahap keempat atau terakhir adalah historiografi atau penulisan sejarah, yaitu memaparkan atau melaporkan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan menjadi sebuah karya tulis ilmiah. Penulisan hasil laporan penelitian sejarah hendaknya dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai proses penelitian dari awal tahap perencanaan hingga akhir penarikan kesimpulan (Wardah, 2014). Dalam penulisan artikel ini yaitu sumber-sumber yang diperoleh dari buku, artikel jurnal dari *Google Scholar*, dan website dituangkan berdasarkan gagasan pribadi, kemudian disusun secara sistematis.

Setiap tahapan dalam penulisan artikel ini menggunakan sumber-sumber dari penulisan yang sudah ada kemudian dikaji dengan metode pustaka deskriptif. Data pustaka yang dapat dipakai misalnya artikel ilmiah, skripsi, website-website resmi, e-book, atau review literatur.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kondisi Pendidikan Perempuan Indonesia Pada Abad ke-20**

Perkembangan sistem pendidikan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh Politik Etis yang dicetuskan oleh Van Deventer. Pada tahun 1899 Van Deventer mengkritik tajam pemerintah kolonial Hindia Belanda yang telah berbuat sewenang-wenang terhadap rakyat bumiputera. Van Deventer berpikiran bahwa pemerintah kolonial dapat mengisi kekosongan kas Negeri Belanda berkat jerih payah dan pengorbanan orang-orang Indonesia. Artinya pihak Belanda telah berhutang budi kepada rakyat Indonesia. Maka dari itu, hutang tersebut harus dibayar dengan cara meningkatkan kesejahteraan penduduk di tanah jajahan melalui gagasannya yaitu Trilogi Van Deventer (Harisuprihanto, 2019). Politik Etis ini ditujukan untuk kepentingan Indonesia dengan cara memajukan penduduk asli dengan tempo secepat-cepatnya melalui pendidikan.

Namun, pada kenyataannya kebijakan pendidikan yang diterapkan pihak Belanda di Indonesia beraroma rasis dan diskriminatif. Selama masa kolonial, Belanda menanamkan sebuah rezim segregasi atau pemisahan rasial menjadi tiga tingkat; ras

kelas pertama adalah *Europeanen* (orang Eropa, kulit putih); ras kelas kedua adalah *Vreemde Oosterlingen* (Timur Asing) yang meliputi orang Tionghoa, Arab, India maupun orang non-Eropa lainnya; dan ras yang ketiga adalah *Inlander*, yang kemudian diterjemahkan menjadi pribumi (Haidah, 2020). Selain itu, pemerintah kolonial mengatur bahwa pendidikan ditujukan hanya untuk kalangan elit atau bangsawan dan dikhususkan untuk kaum laki-laki saja. Sementara itu, fasilitas pendidikan untuk kaum bumiputera sangatlah terbatas, terutama untuk kaum perempuan. Hal tersebut dikarenakan pemerintah kolonial Hindia Belanda menganggap kaum perempuan Indonesia tidak pantas dan tidak layak untuk mengenyam pendidikan.

Sistem feodal (adat istiadat) yang begitu kental juga menjadi dinding pembatas yang sulit dirobek oleh perempuan-perempuan Indonesia pada saat itu. Dimana feodalisme menarik garis pemisah yang tegas antara kedudukan kaum laki-laki dengan kaum perempuan. Dalam adat istiadat Jawa, seorang gadis keturunan bangsawan, contohnya R. A. Kartini setelah memasuki masa remaja harus menjalani proses “pingitan” yaitu mereka tidak boleh keluar rumah lagi (Yuniarti, 2018). Selama masa pingitan, komunikasi dengan masyarakat luar terputus, sampai mereka dipinang oleh laki-laki pilihan orang tuanya. Seringkali laki-laki yang dijodohkan tersebut sama sekali tidak dikenal sebelumnya dan bahkan bukan perjaka lagi, melainkan seseorang yang jauh lebih tua, bahkan sudah mempunyai beberapa istri. Namun, gadis-gadis tersebut tidak dapat menolaknya, karena itulah jalan satu-satunya agar mereka dapat keluar dari kurungan. Sistem feodal yang demikian tentunya sangat merugikan pihak perempuan. Oleh karena itu, perempuan-perempuan Indonesia perlu memperoleh pendidikan yang layak, karena melalui jalan pendidikan itulah harkat dan martabat kaum perempuan akan terangkat sehingga tidak lagi dianggap remeh.

Selain sistem feodal yang ketat, menurut Anwar (2019) adanya budaya patriarkhi di zaman itu juga menjadi penyebab penindasan terhadap kaum perempuan. Patriarkhi adalah sebuah struktur yang menempatkan peran kaum laki-laki sebagai penguasa tunggal serta sentral di atas segalanya. Budaya patriarkhi ini membuat kedudukan kaum perempuan berada di bawah kedudukan kaum laki-laki. Keberadaan perempuan tidak dihargai dan dianggap sebagai kaum rendahan jika dibandingkan dengan kaum laki-laki yang tingkatannya jauh lebih tinggi. Kondisi yang demikian pada akhirnya membuat perempuan kehilangan hak-haknya salah satunya dalam bidang pendidikan.

### ***Raden Ajeng Sutartinah dan Sejarah Berdirinya Organisasi Wanita Taman Siswa***

Pada masa awal pergerakan nasional Indonesia yaitu sekitar tahun 1908, pergerakan perempuan hanya sekadar berjuang untuk memperoleh kedudukan sosial yang tinggi. Terkait dengan kemerdekaan tanah air, itu masih sangat jauh dari angan-angan mereka. Rintangan terbesar dalam perjuangan pergerakan perempuan pada waktu itu yakni terkait budi pekerti keagamaan dan adat istiadat yang masih begitu mengikat. Namun, adanya paham tentang kedudukan perempuan di dalam perkawinan dan keluarga membuat mereka akhirnya berani bangkit untuk memperjuangkan

segala hak yang selama ini belum diperoleh. Sejarah pergerakan perempuan melewati perjalanan yang begitu panjang. Sebelum Indonesia memperoleh kemerdekaan, telah banyak muncul tokoh-tokoh perempuan yang berjuang menyuarakan haknya melalui organisasi-organisasi perempuan. Salah satu tokoh yang turut serta memberi warna dalam perjuangan pergerakan perempuan melalui organisasi yaitu Raden Ajeng Sutartinah.

Raden Ajeng Sutartinah atau lebih dikenal dengan nama Nyi Hadjar Dewantara (istri dari Ki Hadjar Dewantara) merupakan sosok di balik berdirinya Organisasi Wanita Taman Siswa. Wanita Taman Siswa merupakan organisasi perempuan yang berada di bawah naungan Taman Siswa, yang memiliki asas dan bertujuan sama dengan Taman Siswa. Maksud dari adanya perhimpunan tersebut yaitu agar para perempuan turut beraktivitas untuk mendukung kesuksesan organisasi Taman Siswa. Organisasi Wanita Taman Siswa pertama-tama berdiri di Yogyakarta, tepatnya pada tanggal 3 Juli 1922. Raden Ajeng Sutartinah dalam proses pendirian Wanita Taman Siswa dibantu oleh ibu-ibu lain diantaranya yaitu Ibu Rumsiah, Ibu Siti Marsidah, Ibu Jumilah dan Ibu Sutatmo (Cahyani & Swastika, 2015).

Latar belakang terbentuknya Organisasi Wanita Taman Siswa yaitu dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kurang dihargainya kaum perempuan di mata pria. Hal tersebut disebabkan adanya budaya feodal dan patriarki yang mengakar kuat di lingkungan Pulau Jawa khususnya disekitar kediaman Raden Ajeng Sutartinah. Selain itu, lahinya Politik Etis juga menjadi faktor pendorong perempuan untuk memajukan pendidikan bagi kaumnya. Faktor lainnya yaitu adanya kesadaran terkait pentingnya peran perempuan di lingkungan Taman Siswa itu sendiri.

Pada awalnya keanggotaan Wanita Taman Siswa hanya terbatas pada ibu-ibu dan istri pamong yang tergabung dalam lingkungan Taman Siswa saja. Namun, seiring dengan berjalannya waktu persyaratan tersebut diperluas lagi sehingga tidak terkesan eksklusif, yakni meliputi perempuan-perempuan di dalam maupun di luar Taman Siswa yang mengatakan setuju dengan asas dan tujuan Wanita Taman Siswa. Anwar (dalam Dewan Pimpinan Kongres Wanita Indonesia, 2019:2) menjelaskan bahwa di bawah kepemimpinan Raden Ajeng Sutartinah dan semboyan "Suci Tata Ngesti Tunggal", artinya "Suci" hatinya, "Tata" atau tertib lahirnya, "Ngesti" atau menuju, dan "Tunggal" yang berarti satu atau sempurna anggota Wanita Taman Siswa melaksanakan darmanya demi kepentingan kaumnya, bangsa dan negara.

Seperti halnya organisasi Taman Siswa, organisasi wanita ini juga memiliki cabang-cabang di luar Kota Yogyakarta. Oleh sebab itu, pada tanggal 31 Maret 1931 dibentuklah Pengurus Pusat yang berkedudukan di Yogyakarta. Pada masa-masa berikutnya Pengurus Pusat tersebut dikenal dengan Badan Pusat Wanita Taman Siswa yang hingga saat ini masih ada dan berada di Yogyakarta. Dalam Konferensi Daerah Jawa Tengah yang diselenggarakan di Yogyakarta tahun 1931 diputuskan terkait badan pengurus Organisasi Wanita Taman Siswa yaitu Nyi Hadjar Dewantara sebagai ketua, Nyi Surip sebagai Panitera (membantu di bidang peradilan), Nyi Sudarminto sebagai anggota, Nyi S. Sukemi sebagai anggota, Nyi Sri Mangunsarkoro sebagai Wakil

Pusat di Jawa Tengah, kemudian Nyi Sudjarwo sebagai Wakil Pusat di Jawa Timur. Konferensi tersebut terselenggara atas dasar inisiatif dari Raden Ajeng Sutartinah dan Sri Mangunsarkoro.

Terselenggaranya Konferensi Daerah Jawa Tengah menjadi tonggak sejarah berdirinya Organisasi Wanita Taman Siswa. Wanita Taman Siswa lahir sebagai sebuah organisasi karena memiliki arah dan tujuan yang jelas yaitu menciptakan masyarakat tertib damai, diketahui oleh segenap pihak dan anggota-anggotanya yakin akan kebenaran tujuan tersebut. Satu hal yang penting dalam menjalankan kehidupan berorganisasi adalah adanya hubungan yang erat dan harmonis atas dasar kepentingan bersama. Hubungan harmonis yang dimaksud bukan hanya pada tugas-tugas organisasi itu, melainkan juga antara individu atau orang-orang yang menjalankan tugas-tugas tersebut. Jadi, koordinasi di antara tugas-tugas dan orang-orang yang menjalankannya harus ada. Sebagai organisasi yang bersifat otonom, maka tata kehidupan Wanita Taman Siswa diatur dalam Peraturan Besar Wanita Taman Siswa. Mengenai tata hubungan kerja sebagai organisasi antara Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa dan Badan Pusat Wanita Taman Siswa diatur di dalam Surat Keputusan Bersama, sebagai hasil dari pemikiran bersama antara kedua belah pihak.

Organisasi Wanita Taman Siswa berkedudukan di lingkungan Taman Siswa. Oleh karena itu, organisasi ini berkewajiban membantu Taman Siswa dalam segala usahanya, khususnya pada pendidikan keperempuanan (Aini, 2006). Fungsi lain dari Organisasi Wanita Taman Siswa yaitu menjaga kesucian dalam masyarakat Taman Siswa, memelihara hubungan kekeluargaan dalam ranah Taman Siswa, mengadakan hubungan dengan organisasi pergerakan perempuan di luar Taman Siswa, yang syaratnya tidak bertentangan dengan asas dan tujuan Wanita Taman Siswa, dan turut serta dalam mensukseskan pembangunan negara (Dewan Pimpinan Kongres Wanita Indonesia, 1986).

Wanita Taman Siswa sebagai sebuah organisasi resmi juga memiliki visi dan misi. Visi Organisasi Wanita Taman Siswa sebagaimana yang dikutip penulis dari kowani.or.id adalah “Wanita Taman Siswa sebagai organisasi masyarakat di lingkungan Taman Siswa bermaksud memberi wadah kepada para wanita, anggota keluarga serta pecinta Taman Siswa untuk menyumbangkan darma baktinya kepada Taman Siswa, masyarakat, dan Negara Republik Indonesia serta meningkatkan anggotanya agar menjadi ibu bagi generasi penerus yang beriman, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat dan berbudi pekerti luhur.” Untuk mendukung visi tersebut, maka Wanita Taman Siswa membuat langkah untuk mencapainya melalui misi sebagai berikut “Organisasi yang melaksanakan tugasnya didasari oleh kesadaran bahwa wanita sebagai pemangku keturunan, maka diharapkan wanita Taman Siswa dapat mengembangkan pengaruh keperempuannya secara optimal dan positif untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera, menjaga kesucian serta ketertiban dalam kehidupan masyarakat Taman Siswa”.

Organisasi Wanita Taman Siswa mendorong para anggotanya untuk berperan dalam kehidupan masyarakat serta menggunakan hak dengan sebaik-baiknya sebagai

warga negara. Perempuan juga berpotensi untuk membangun negara serta berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan kaum pria. Artinya, kedudukan dan peran perempuan setara dengan pria dalam kehidupan sosial maupun bernegara. Atas dasar hal tersebut, maka dalam proses pendidikan kepada anak-anak putri harus mulai ditanamkan terkait kesadaran tersebut. Anak-anak putri harus dididik agar menjadi manusia yang memiliki budi pekerti luhur, susila, terampil menghadapi tantangan kehidupan sehingga perlu ditanamkan disiplin kekeluargaan yang pada perkembangan selanjutnya akan memberi keuntungan bagi perkembangan mereka.

Organisasi Wanita Taman Siswa dalam perjalanannya menjelma menjadi himpunan yang dalam pengabdianya turut meramaikan dunia pendidikan. Hal tersebut tidak terlepas dari peran pendirinya yaitu Raden Ajeng Sutartinah yang memiliki wawasan pamong. Ia selalu memberi kesempatan kepada kader-kader Wanita Taman Siswa yang telah terlatih untuk berkiprah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Maka tidak diragukan lagi jika anggota Wanita Taman Siswa sangat terampil bergerak di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang pada dasarnya merindukan sosok pejuang-pejuang perempuan tangguh demi memajukan pendidikan dan hak-hak perempuan lainnya. Gerak langkah Wanita Taman Siswa tersebut beriringan dengan Taman Siswa yaitu melalui pendidikan nasionalnya yang sama-sama berjuang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membuat rakyat Indonesia memiliki jiwa merdeka, berkebudayaan, berkepribadian kuat dan sanggup berdiri di atas kakinya sendiri.

### ***Prinsip Pendidikan Wanita Taman Siswa***

Pada dasarnya prinsip pendidikan Wanita Taman Siswa sama dengan konsep pendidikan Taman Siswa. Cara pendidikan *Among* digunakan dalam konsep pendidikan Taman Siswa, yaitu menempatkan kaum perempuan pada posisi yang penting, terutama kedudukannya sebagai pamong perempuan. Hal tersebut didasarkan pada semangat kodrati perempuan yang dapat membimbing dan memelihara kemajuan anak-anak. Dengan adanya semangat kodrati yang dimiliki oleh kaum perempuan, maka dalam pendidikan di Taman Siswa, khususnya pendidikan yang diberikan kepada anak-anak diserahkan kepada pamong perempuan. Sifat-sifat yang dimiliki oleh perempuan, seperti sabar, tekun, teliti, memiliki cinta kasih sangat diperlukan dalam mendidik anak, karena pada hakikatnya usia anak-anak membutuhkan hubungan batin yang murni dan kuat dengan ibunya, sehingga anak-anak lebih tertarik jika diajar oleh pamong perempuan. Adapun pamong laki-laki mengenai kesabaran, ketekunan, cinta kasih dan hal lainnya tidak dapat disamakan dengan pamong perempuan, karena di antara mereka memiliki kodrat yang berbeda. Mengingat bahwa perempuan memegang peranan yang penting dalam bidang pendidikan, terutama pendidikan bagi usia anak-anak, maka Ki Hadjar Dewantara mempunyai perspektif bahwa perempuan sangat cocok berkecimpung dalam dunia Pendidikan (Yuliati, 2016).

Materi yang diberikan di sekolah, baik laki-laki maupun perempuan di Taman Siswa adalah pengajaran *ko-edukasi* dan *ko-instruksi*. Pelaksanaan pendidikan *ko-edukasi* yaitu dalam proses belajar antara siswa laki-laki maupun perempuan dilakukan secara bersama. Namun, hal itu bukan berarti tidak ada aturan yang membatasi pergaulan di antara mereka, keduanya diajarkan untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Dalam pendidikan bersama atau *ko-edukasi*, cara dan alat yang digunakan oleh guru berbeda. Perbedaan tersebut bertalian dengan sifat laki-laki dan perempuan yang berbeda, di mana anak perempuan lebih memiliki sensitivitas yang tinggi. Sehingga, melalui cara pendidikan *Among*, terdapat aturan-aturan seperti sampai usia 14 tahun cara pendidikan bersama justru lebih baik dilakukan pada masa ini. Kemudian, untuk masa puber (usia 14-16 tahun) pendidikan yang diberikan harus dengan hati-hati dan peran guru atau pendidik sangatlah besar. Memasuki usia 16 tahun ke atas guru bekerja sama dengan orang tua benar-benar harus mengawasi pergaulan di antara laki-laki dan perempuan, sebab di masa itu nafsu birahi mereka sedang menyala-nyala sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Selain itu, pendidikan anak perempuan Indonesia harus diberikan dasar-dasar kebangsaan (Yuliati, 2016). Pendidikan kebangsaan merupakan pendidikan yang selaras dengan kodrat dan adat istiadat bangsa mereka, sehingga muncul rasa nasionalisme serta patriotisme. Pendidikan kebangsaan di sini dimaknai secara luas, artinya tidak menutup diri dari dunia luar. Justru pengaruh-pengaruh dari luar tersebut diterima secara bijak untuk memperbaiki dan mempertinggi kualitas pendidikan di Indonesia. Pendidikan kebangsaan yang diajarkan oleh Taman Siswa maupun Wanita Taman Siswa bersifat membangun dan menguatkan rasa kecintaan terhadap tanah air dengan tetap berlandaskan keadilan. Di dalam pendidikan kebangsaan juga terkandung nilai-nilai religi yang dapat memperluas dan memperdalam pendidikan, sehingga menghasilkan sistem pendidikan yang dijiwai oleh agama.

### ***Gerak Juang Organisasi Wanita Taman Siswa Menuntut Hak Pendidikan***

Di bawah kepemimpinan Raden Ajeng Sutartinah, Organisasi Wanita Taman Siswa terus meningkatkan kegiatan-kegiatannya, khususnya untuk memajukan kehidupan kaum perempuan. Raden Ajeng Sutartinah mengirimkan artikel-artikel keperempuanan di beberapa majalah seperti Wasita dan Pusara yang sampai saat ini masih tetap menjadi organ persatuan. Kepiawaiannya Raden Ajeng Sutartinah dalam menulis artikel didapatkan dari suaminya yaitu Ki Hadjar Dewantara yang merupakan seorang jurnalis. Selain itu, ia juga mengadakan siaran-siaran di radio Mavro Yogyakarta (Anwar & Yulifar, 2019). Radio ini digunakan sebagai alat perjuangan rakyat yang salah satu topiknya membahas terkait permasalahan kebudayaan. Organisasi Wanita Taman Siswa tidak hanya berjuang di lingkup dalam saja, melainkan juga menjalin kerja sama dengan berbagai organisasi luar. Usaha tersebut dilakukan setelah Raden Ajeng Sutartinah menjadi pemrakarsa diadakannya Kongres Perempuan

Indonesia pertama pada tanggal 22-25 Desember 1928. Dari kongres tersebut R. A. Sutartinah menemukan mitra yang memiliki kesamaan pikiran dan tujuan yaitu Ibu Soekonto dari Wanita Oetomo dan Nona Soejatin dari organisasi Putri Indonesia. Mereka bersepakat untuk menyatukan seluruh gerakan perempuan Indonesia ke dalam satu persatuan dan kesatuan untuk menjalin kebersamaan dan memperoleh persamaan hak pendidikan dengan memperbanyak sekolah-sekolah untuk anak-anak putri.

Gerak juang Organisasi Wanita Taman Siswa bukan tidak pernah mengalami hambatan dan ancaman. Organisasi ini harus berjuang melawan Ordonansi Sekolah Liar dari pemerintah kolonial Belanda tahun 1932. Hal tersebut di latar belakang pertumbuhan Taman Siswa yang begitu pesat, sehingga pihak Belanda ingin mematikan organisasi tersebut dengan cara mengeluarkan undang-undang yang dinamakan *Wilde Scholen Ordonantie* pada tanggal 17 September 1932. Undang-undang Ordonansi Sekolah Liar tersebut mulai diperlakukan pada tanggal 1 Oktober 1932 (Bratawiswara, 1997:43). Maksud dari ordonansi adalah memberi kuasa kepada pemerintah untuk mengurus segala hal dari sekolah-sekolah yang tidak dibiayai oleh negara (pemerintah Belanda), seperti sekolah partikelir tersebut harus meminta izin terlebih dahulu, guru-guru juga harus meminta izin sebelum mengajar. Mengetahui hal tersebut, Ki Hadjar Dewantara selaku pimpinan Taman Siswa mengambil kebijakan untuk melakukan perlawanan terhadap undang-undang tersebut.

Adanya Ordonansi Sekolah Liar telah menjadi batu sandungan yang menghambat perjuangan bangsa Indonesia dan merebut kemerdekaan Taman Siswa serta Organisasi Wanita Taman Siswa sebagai sebuah lembaga pendidikan dan kebudayaan nasional. Ki Hadjar Dewantara mengambil keputusan dan bertekad agar Taman Siswa bersama Wanita Taman Siswa melawan undang-undang sekolah liar tersebut dengan cara Satyagraha atau perlawanan secara diam-diam sampai titik darah penghabisan. Pernyataan dan tekad yang diberikan oleh Organisasi Taman Siswa melalui Nyi Hadjar Dewantara menyebabkan pemerintah Belanda geram dan bertindak tegas dengan menutup dan menyegel Taman Siswa. Namun, pimpinan dan para anggota Taman Siswa maupun Wanita Taman Siswa tidak menyerah begitu saja, mereka tetap melakukan segala bentuk perlawanan.

Perlawanan ditunjukkan dengan mengadakan gerilya pendidikan, menggunakan semboyan penyulut semangat “patah tumbuh hilang berganti, mati satu tumbuh seribu” (Anwar & Yulifar, 2019). Gerilya pendidikan ini merupakan cara untuk melaksanakan pendidikan secara sembunyi-sembunyi, seperti dengan melaksanakan kegiatan belajar mengajar di rumah guru atau sukarelawan. Raden Ajeng Sutartinah juga memberi arahan kepada para guru Taman Siswa agar mereka mendatangi rumah masing-masing murid untuk melakukan pembelajaran. Hal tersebut dilakukan agar murid-murid dapat terus belajar walaupun pihak pemerintah kolonial Hindia Belanda terus melakukan ancaman dan penekanan.

Aksi berani dari Taman Siswa dan Wanita Taman Siswa ini mendatangkan simpati dari anggota organisasi pergerakan dan partai-partai lainnya. Ratusan pejuang

mengajukan diri untuk menjadi sukarelawan dan sukarelawati guru untuk menggantikan tugas-tugas guru yang ditangkap pihak Belanda, dengan konsekuensi siap pula jika sewaktu-waktu mereka ditangkap. Gerakan Gerilya Pendidikan yang digelorakan oleh Taman Siswa dan Wanita Taman Siswa serta dukungan dari organisasi-organisasi lainnya membuat posisi pemerintah kolonial Hindia Belanda tersudut. Akhirnya pemerintah kolonial terpaksa mencabut kembali undang-undang Ordonansi Sekolah Liar. Upaya keras yang dilakukan oleh Raden Ajeng Sutartinah dan anggota-anggota yang tergabung dalam Wanita Taman Siswa maupun Taman Siswa membuktikan bahwa antara kaum laki-laki dan kaum perempuan merupakan mitra yang memiliki kedudukan sejajar yang dapat saling membantu satu sama lain dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan.

Melalui Organisasi Wanita Taman Siswa, Raden Ajeng Sutartinah berhasil menciptakan hal positif dalam memperjuangkan hak pendidikan perempuan di Indonesia yaitu: (1) mendirikan *Study Fonds* atau beasiswa bagi para gadis yang kurang mampu untuk membiayai sekolah agar mereka tetap bisa bersekolah, (2) menanamkan pengertian agar perempuan Indonesia dapat menjadi "Ibu Bangsa" yang dapat mendidik dan mengembangkan generasi agar memiliki sikap kebangsaan, (3) memperbaiki nasib buruh perempuan Indonesia melalui jalan pendidikan (Ridjal, dkk, 1992:102), dan (4) membuka Yayasan Taman Pendidikan Dewanti di bawah naungan Badan Pusat Wanita Taman Siswa. Yayasan ini berhasil mengadakan pendidikan bagi perempuan sejak dini di sekitar lingkungan Taman Siswa.

Kiprah perjuangan Wanita Taman Siswa tidak berhenti pada masa kepemimpinan Raden Ajeng Sutartinah saja. Melainkan terus berjalan mengikuti perkembangan zaman hingga saat ini dan masih memfokuskan terhadap kesejahteraan serta pembinaan perempuan melalui pendidikan. Hingga sekarang Badan Pusat Wanita Taman Siswa masih ada dan berkedudukan di Jalan Taman Siswa No. 25 Yogyakarta. Fokus kegiatannya lebih luas lagi yaitu mencakup pendidikan dan IPTEK, pembinaan mental dan budaya, sosial kependudukan dan kesejahteraan keluarga, ekonomi dan koperasi, hukum, tenaga kerja, lingkungan hidup, serta hubungan luar negeri (Kowani, 2017).

## **KESIMPULAN**

Pada abad ke-20 sistem feodal dan budaya patriarkhi di Indonesia sangat mengikat dan membatasi ruang gerak kaum perempuan. Keberadaan perempuan tidak dihargai dan dianggap sebagai kaum rendahan jika dibandingkan dengan kaum laki-laki. Kondisi yang demikian pada akhirnya membuat perempuan kehilangan hak-haknya, salah satunya hak menempuh pendidikan. Pada tahun 1908 mulai muncul pergerakan nasional Indonesia yang di dalamnya terdapat pergerakan-pergerakan kaum perempuan dengan tujuan memperjuangkan hak-hak yang selama ini belum mereka dapatkan. Salah satu tokoh yang turut serta memberi warna dalam perjuangan pergerakan perempuan Indonesia melalui organisasi yaitu Raden Ajeng Sutartinah. Raden Ajeng Sutartinah atau lebih dikenal dengan Nyi Hadjar Dewantara merupakan

sosok di balik berdirinya Organisasi Wanita Taman Siswa yang memiliki asas dan tujuan sama dengan Taman Siswa.

Organisasi Wanita Taman Siswa pertama-tama berdiri di Yogyakarta, tepatnya pada tanggal 3 Juli 1922. Latar belakang terbentuknya Organisasi Wanita Taman Siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kurang dihargainya kaum perempuan di mata pria, lahirnya Politik Etis, serta adanya kesadaran terkait pentingnya peran perempuan di lingkungan Taman Siswa itu sendiri. Pada dasarnya prinsip pendidikan Wanita Taman Siswa sama dengan konsep pendidikan Taman Siswa yaitu menggunakan sistem *Among* yang menempatkan kaum perempuan pada posisi penting, terutama kedudukannya sebagai pamong perempuan.

Gerak juang Organisasi Wanita Taman Siswa bukan tidak pernah mengalami hambatan dan ancaman. Organisasi ini harus berjuang melawan Ordonansi Sekolah Liar dari pemerintah kolonial Hindia Belanda pada tahun 1932. Namun, Wanita Taman Siswa bersama Taman Siswa tidak tinggal diam dan maju melawan ordonansi tersebut melalui gerakan “Gerilya Pendidikan”. Gerakan Gerilya Pendidikan yang digelorkan oleh Taman Siswa dan Wanita Taman Siswa mendapat dukungan dari organisasi-organisasi lainnya sehingga membuat posisi pemerintah kolonial Hindia Belanda tersudut. Akhirnya pemerintah kolonial terpaksa mencabut kembali undang-undang Ordonansi Sekolah Liar. Kiprah perjuangan Wanita Taman Siswa tidak berhenti pada masa kepemimpinan Raden Ajeng Sutartinah saja. Melainkan terus berjalan mengikuti perkembangan zaman hingga saat ini dan masih memfokuskan terhadap kesejahteraan serta pembinaan perempuan melalui pendidikan. Hingga sekarang Badan Pusat Wanita Taman Siswa masih ada dan berkedudukan di Jalan Taman Siswa No. 25 Yogyakarta.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aini, K. (2006). *Peranan Organisasi Wanita Taman Siswa dalam Pengembangan Pendidikan di Yogyakarta (1922–1946)*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret: Surakarta.
- Anwar, R. L. I, & Yulifar, L. (2019). Peranan Raden Ajeng Sutartinah dalam Memperjuangkan Hak Pendidikan untuk Perempuan melalui Organisasi Wanita Tamansiswa Tahun 1922-1971. *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 8(2), 171-186.
- Bratasiswara, H. (1997). *Dr. Ki Hadjar Dewantara, Pejuang, Pendidikan, Budayawan dan Pahlawan Nasional*. Surakarta: Rekso Pustoko.
- Cahyani, S. T. F., & Swastika, K. (2015). Perjuangan Organisasi Perempuan Indonesia Menuntut Hak Pendidikan Pada Masa Kolonial Belanda Tahun 1912-1928. *Jurnal Pendidikan*. 1(1):1-14.
- Dewan Pimpinan Kongres Wanita Indonesia. (1986). *Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia 1928-1978*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Haidah, Amalina. (2020). *Karifan Lokal Pada Bangunan Kolonial SD Bina Harapan Purbalingga (Alasan Rasis dan Diskriminatif Dibalik Pembangunannya)*. Karya Tulis Ilmiah.
- Harisuprihanto, Lilik. (2019). *Sejarah Indonesia untuk SMA/MA Semester 1*. Surakarta: CV Grahadi
- KOWANI.WANITA TAMAN SISWA. (2017). <https://kowani.or.id/wanita-taman-siswa>, diakses pada 10 Maret 2023 pukul 19.05
- Laksono, A. D. (2018). *SEJARAH: Pengertian, Ruang Lingkup, Metode, dan Penelitian*. Pontianak: Derwati Press.
- Megawati, P. (2016). PEMIKIRAN SRI WULANDARI MANGUNSARKORO TENTANG PENDIDIKAN DAN WANITA (1923-1959). *Risalah*, 2(8).
- Ridjal, F, dkk. (1992). *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Sudiyo. (2004). *Perhimpunan Indonesia*. Jakarta: Bina Adiaksara.
- Sukmana, W. J. (2021). Metode penelitian sejarah. *Seri Publikasi Pembelajaran*, 1(2), 14.
- Wardah, E. S. (2014). Metode penelitian sejarah. *Tsaqofah*, 12(2), 165-175.
- Yuliati, Y. (2016). Konsep Pendidikan Perempuan di Taman Siswa. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 10 (1), hlm. 114- 124.
- Yuniarti, E. S. (2018). Pendidikan Bagi Perempuan Jawa Pada Abad Ke 19. *Sejarah Dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*, 12(1), 30-38.